



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KAIN SISA
JAHITAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 11522105042**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
KABUPATEN ROKAN HILIR yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Ridwan**

NIM : 11522105042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 MEI 1442 H
2021 M

Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir**, yang ditulis Oleh :

Nama : **Muhammad Ridwan**
 NIM : 11422105042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis / 01 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Haniah Lubis., ME.Sy

Penguji I
Dr. Johari., M.Ag

Penguji II
Dr. M.Ihsan., M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ridwan (2021) : Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya jual beli kain sisa jahitan oleh pengusaha jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli sisa kain jahitan oleh penjahit adalah karna berlebihnya sisa kain jahitan tersebut sehingga penjahit memanfaatkan sisa jahitan untuk di jual kembali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir dan Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. Populasi dari penelitian ini berjumlah 40 orang terdiri dari 13 orang pengusaha jahitan, 2 orang pengrajin souvenir dan 25 pemesan jahitan. Adapun sampel yang digunakan dengan teknis *purposive sampling* sebanyak 18 orang yang terdiri dari 8 orang pengusaha jahitan 2 di antaranya pengrajin souvenir dan 10 orang pemesan jahitan. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Kecamatan Pasir limau Kapas kabupaten Rokan Hilir. Untuk mendapatkan data yang valid di gunakan dalam primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan analisis data ditinjau dari fiqh muamalah, praktik jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit dengan memanfaatkan kain sisa jahitan untuk di olah kembali dan di jual, di situlah penjahit akan melakukan transaksi penjualan hasil dari olahan kain sisa jahitan kepada pembeli. maka diperoleh kesimpulan bahwa jual beli kain sisa jahitan tidak melanggar syariah dan diperbolehkan (mubah). Hal ini karena, telah menjadi kebiasaan (urf) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Keluarga besar penulis kakak, abang, Pengganti dari kedua orang tua atas curahan cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dan memberikan dukungan moril dan materil, kerja keras serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk adikanda, sehingga adikanda bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. Cl sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan II, serta jajaran dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, sebagai dosen pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan & bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. A, sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pengusaha Penjahit di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir
8. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Bapak Camat dan jajaran pegawai di lingkup Kecamatan Pasir Limau Kapas.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya serta Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Seluruh teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum, teman-teman seangkatan seperjuangan, dan kerabat, yang tidak bisa disebutkan satu persatunamanya serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan materiil dan moril bagi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 1 Juni 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	11
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	11
B. Geografis Dan Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas	12
C. Lokasi Penelitian	20
D. Data Pengusaha Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas ...	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	23
A. Pengertian Jual Beli.....	23
B. Dasar Hukum Jual Beli	28
C. Hukum Jual Beli.....	28
D. Rukan dan Syarat Jual Beli	29
E. Syarat-syarat Jual Beli.....	32
F. Persyaratan Dalam Jual Beli	35
G. Bentuk-bentuk Jual Beli	39
H. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	41
I. Larangan Jual Beli Dalam Islam	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Khlar Dalam Jual Beli	44
K. Hikmah Jual Beli	45
L. Akad	46
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR	55
A. Praktek Jual Beli kain Sisa Jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas	55
B. Tinjauan Fiqh Muamalah	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk dan KK Berdasarkan Kelurahan danKepenghuluhan di Kecamatan Pasir Limau Kapas	13
Tabel 2.2	Jumlah penduduk Menurut Agama di Kecamatan Pasir Limau Kapas	14
Tabel 2.3	Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Pasir Limau Kapas	15
Tabel 2.4	Sarana Pendidikan di Kecamatan Pasir Limau Kapas	16
Tabel 2.5	Sarana Kesehatan di Kecamatan Pasir Limau Kapas	17
Tabel 2.6	Tenaga Medis di Kecamatan Pasir Limau Kapas	17
Tabel 2.7	Gambaran Ekonomi di Bidang Perikanan	18
Tabel 2.8	Gambaran Ekonomi di Bidang Pertanian	19
Tabel 2.9	Gambaran Ekonomi di Bidang Perkebunan.....	20
Tabel 2.10	Gambaran Lokasi Penelitian di Kecamatan Pasir Limau Kapas	21
Tabel 2.11	Data Pengusaha Jahitan	22
Tabel 4.1	Jumlah Penghasilan Penjahit dan Souvenir Tahun..	60
Tabel 4.2	Apakah Pemesan Mengetahui Adanya Sisa Kain Dari Jahitan ..	61
Tabel 4.3	Apakah Pemesan Setuju Jika Sisa Kain Jahitan di Manfaatkan Oleh Penjahit.....	64
Tabel 4.4	Apakah Pemesan Merasa Kerugian Atas Pemanfaatan Sisa Jahitan Oleh Penjahit	65
Tabel 4.5	Apakah Penjahit Memberitahukan Kepada Pemesan Mengenai Kelebihan Sisa kain Jahitan Sebelum di Manfaatkan	65
Tabel 4.6	Apakah Penjahit meminta Pendapat Ulama dan Tokoh masyarakat Sebelum Melakukan Jual Beli Sisa Kain Jahitan	66
Tabel 4.7	Apakah Jual Beli Sisa Kain Jahitan Membantu Dalam Kehidupan Ekonomi Pengusaha Jahitan.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial digariskan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi ini terjadi dengan berbagai macam bentuk dan tujuan. Pada dasarnya, interaksi antara manusia ini dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial sehingga Islam mengaturnya dalam bentuk muamalah. Oleh karena itu, dalam bermuamalah disebutkan bahwa hukum halal diterapkan pada muamalah itu ada pada semua aktivitas selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹ Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah utama dalam transaksi muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.²

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat

¹ Muclas Al-Farbi, *Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Araska Publisher 2006).h.19

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2012).h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh di perjual belikan.³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, perampokan, riba, dan lain-lain. Salah satu aturan hukum jual beli yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan surat an-Nisa ayat 29 yaitu :

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ

Artinya “ dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Berdasarkan dalil di atas, bahwa secara syariat jual beli itu memang diperbolehkan. Secara syariat, maksudnya adalah melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat transaksi jual beli. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam Islam.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm.27

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa harus berakal, baligh, kehendak sendiri dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan, sedangkan akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah. Sebagai pihak penjual dan pembeli dinilai tidak ada paksaan untuk membeli ataupun menjual sesuatu karna hal ini beradasrkan saling ridho atau suka sama suka, Dan terjadinya transaksi jual beli dalam Islam, haruslah suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu, dan barang itu dapat diketahui.⁵

Dalam jual jual beli kain sisa jahitan yang menjadi tempat penelitian penulis yang akan dijadikan objek adalah mengenai kain sisa jahitan yang sudah tidak digunakan lagi yang diperoleh penjahit dari pemesan yang tidak meminta kembali sisa kain jahitan tersebut, dan pengusaha jahitanpun tidak mengembalikan sisa kain jahitan namun dimanfaatkan dan dijual oleh penjahit kepada pengrajin souvenir.

Pada era globalisasi, Banyak manusia lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit pula manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan atau sesuai dengan model yang diinginkan. Dari alasan tersebut, bahwa manusia masih membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Usaha jahitan pakaian ini juga salah satu tempat yang mengimpementasikan kegiatan jual beli, yang akan menjadi lokasi penelitian penulis di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Adapun

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: 1997)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tempat usaha jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini ada sebanyak 8 pengusaha jahitan 2 di antaranya pengrajin souvenir dengan pelayanan membuat pakaian seperti kebaya, jas, pakaian pengantin, celana, rok, jilbab, seragam sekolah dan lain-lain.⁶

Penjahit biasanya membuat pakaian pemesan yang memesan pakaian dengan model yang diinginkan dan kain yang dibawa sendiri oleh pemesan kemudian penjahit membuatnya. Dalam proses penjahitan tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju dan model yang diinginkan oleh pemesan. Dalam proses penjahitan jika kekurangan kain penjahit meminta tambahan kain kepada pemesan, namun jika ada kelebihan kain penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dalam pemanfaatan kain tersebut penjahit memanfaatkan untuk diperjualbelikan.⁷ Sedangkan pemesan pakaian tidak menanyakan dan meminta kembali kelebihan dari sisa kain jahitan tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR”**

⁶ Observasi Lokasi Penelitian Di kecamatan Pasir Limau Kapas pada bulan oktober 2020

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha jahitan *Wawancara*, Kecamatan Pasir Limau Kapas, 21 januari 2021

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Imay, pemesan, *Wawancara*, Kecamatan Pasir Limau Kapas, 21 januari 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kain sisa jahitan pada Pengusaha Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuaran dan interprestasi yang keliru terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir di tinjau menurut Fiqh Muamalah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli kain sisa jahitan di kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalah tentang tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli kain sisa jahitan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

di Kecamatan pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Islam sosiologis atau dikenal dengan penelitian hukum sosialis yuridis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di tempat usaha jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini menjadi tempat utama untuk mendapatkan data informasi dari pengusaha jahitan dan pemesan jahitan.

3. Subjek dan Objek penelitian

- a. Sebagai Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha jahitan, pengrajin souvenir dan pemesan jahitan.
- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah Jual Beli Kain Sisa Jahitan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengusaha jahitan, pengrajin souvenir dan pemesan jahitan sebanyak 40 orang di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini diambil sampel dari pelaku yang ada yang dijadikan sampel, yakni terdiri dari 8 pengusaha jahitan 2 di antara pengrajin souvenir dan 10 pemesan jahitan di kecamatan pasir limau kapas Kabupaten Rokan Hilir .

5. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Fiqh Muamalah yang terkait dengan pelaksanaan jual beli kain sisa jahitan,serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu Pengusaha Jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun

yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.

6. Teknis Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, angket, dan kajian pustaka.

- a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, di pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli kain sisa jahitan.
- b. Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab kepada pengusaha jahitan serta pengrajin souvenir dan pemesan jahitan sebanyak 18 orang dengan metode wawancara.
- c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada pengusaha jahitan dan pemesan jahitan. Angket ini menjadi data pelengkap agar data yang didapatkan oleh penulis semakin valid.
- d. Kajian Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan notulen rapat, agenda, dan lainnya.

7. Teknis Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

yang dapat dimengerti. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

8. Teknis Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudia diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Sistematika Data yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.⁹

F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya lima bab, di mana masing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistem penulisan.

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* h. 245



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II Berisi tentang sejarah, geografis, demografis, kondisi sosial ekonomi, lokasi penelitian, dan gambaran umum tempat Pengusaha Penjahit di kecamatan pasir limau kapas.

BAB III Membahas tentang jual beli menurut hukum Islam, yang berisikan pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, syarat-syarat jual beli, persyaratan jual beli, bentuk jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, larangan,dan ikhtiyar dalam jual beli, hikmah jual beli, dan membahas tentang akad menurut hukum Islam, yang berisikan pengertian akad, rukun dan syarat, akibat atau dampak akad, macam-macam akad,dan berakhirnya akad.

BAB IV Membahas tentang praktik jual beli kain sisa jahitan dan tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V Penutup, Yakni Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah(skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan daftar pustaka.



BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pasir Limau Kapas

Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas beberapa kecamatan. Salah satunya, adalah Kecamatan Pasir Limau Kapas yang merupakan salah satu kecamatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 23 tahun 2002, tanggal 05 oktober 2002 dan diundangkan tanggal 07 oktober 2002 pada lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 Nomor 25 tentang pembentukan kecamatan Senaboi, kecamatan Pasir Limau Kapas, kecamatan Pujud Dan kecamatan Simpang Kanan.

Kecamatan Pasir Limau kapas terbentuk tahun 2002 yang terpisah dari Kecamatan Kubu yang di sebut dengan kecamatan Kubu Luar yang terdiri dari 4 (empat) Kepenghuluan (Desa) yaitu Panipahan, Teluk Pulau, Sungai Daun, dan Pasir Limau Kapas. Dikarenakan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas merupakan kepenghuluan yang tertua, maka tokoh masyarakat, Pemuka Agama, dan Tokoh Pemuda yang mengambil kesepakatan dengan memberi nama Kecamatan Kubu Luar Diganti dengan kecamatan Pasir Limau Kapas.

Setelah kecamatan Pasir limau kapas di Defenitifkan terpisah dari kecamatan Kubu oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka kecamatan Pasir Limau kapas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

saat ini sudah menjadi 1 (satu) kelurahan dan 7 (tujuh) Kepenghuluan (Desa) yang terdiri dari antara lain:

1. Kelurahan Panipahan Kota
2. Kepenghuluan Panipahan
3. Kepenghuluan Panipahan Darat
4. Kepenghuluan panipahan Laut
5. Kepenghuluan Teluk Pulau
6. Kepenghuluan Pasir Limau kapas
7. Kepenghuluan Sungai Daun
8. Kepenghuluan Pulau Jemur

B. Gografis dan Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Letak geografis, luas wilayah di kecamatan Pasir Limau kapas memiliki

Luas Wilayah 1.206,72 KM dengan batas-batas wilayah kecamatan Pasir Limau

Kapas adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat melaka malaysia
- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Simpang Kanan

Kecamatan Pasir Limau kapas terdiri dari beberapa sungai dan pulau,

adapun sungai yang terdapat di kecamatan Pasir limau kapas memiliki peranan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi pendapatan masyarakat di antaranya Sungai Panipahan, Sungai Teluk Pulau, Sungai Pasir Limau kapas, dan Sungai Daun. Sebagian besar wilayah kecamatan Pasir Limau Kapas terdiri dari Daratan rendah yang terletak di pesisir pantai kabupaten Rokan Hilir. Jarak Kecamatan Pasir Limau Kapas ke ibu kota kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi adalah 71 Km dengan jarak tempuh menggunakan motor adalah 6 jam. Sedangkan melalui jalur laut menggunakan kapal speed boat adalah 2 jam.

2. Kondisi demografi

Masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas terdiri dari 9.909 KK dengan total jumlah penduduk 40.403 jiwa. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 20.514 jiwa dan perempuan 19.889 jiwa.

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN KK BERDASARKAN KELURAHAN DAN KEPENGHULUAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No.	Kelurahan Dan Kepenghuluan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Kelurahan Panipahan Kota	2.756	586
2	Kepenghuluan Panipahan	4.798	1.206
3	Kepenghuluan Panipahan Darat	10.923	2.713
4	Kepenghuluan Panipahan Laut	2.913	695
5	Kepenghuluan Teluk Pulau	7.425	1.873
6	Kepenghuluan Pasir Limau Kapas	5.804	1.435
7	Kepenghuluan Sungai Daun	4.885	1.176
8	Kepenghuluan Pulau Jemur	899	225
Jumlah		40.403	9.909

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penduduk kecamatan Pasir Limau kapas merupakan penduduk yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat besar dibandingkan dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan perekonomian Masyarakat semakin merosot dan penghasilan masyarakat semakin berkurang seperti Nelayan, Perdagangan, perkebunan dan lain sebagainya.

3. Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas dengan berbagai macam kepercayaan dan agama, masing-masing dapat menyesuaikan dan menghormati kepercayaan yang di anut oleh warga lainnya. Saling menghormati dan menghargai agama yang dianut merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karna masalah agama dan kepercayaan merupakan keyakinan masing-masing yang tidak ada paksaan untuk seseorang memeluk salah satu agama.

TABEL 2.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Agama	Jumlah
1	Islam	26.891
2	Katholik	1.984
3	Protestan	3.868
4	Budha	7.660
Jumlah		40.403



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa secara mayoritas penduduk kecamatan Pasir Limau Kapas memeluk agama Islam yang berjumlah 26.891 orang, yang kemudian disusul oleh agama Budha yang berjumlah 7.660 orang, agama Protestan berjumlah 3.868 orang dan agama Katholik berjumlah 1.984 orang. Dengan begitu kegiatan keagamaan yang berbasis islam sangatlah banyak di Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan melihat banyaknya rumah ibadah sebagai berikut:

TABEL 2.3
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	34 Buah
2	Surau/Musholla	64 Buah
3	Gereja	10 Buah
4	Vihara	24 Buah
Jumlah		132 Buah

Berdasarkan tabel diatas jumlah Tempat Ibadah Agama Islam Sebanyak 34 Mesjid dan 64 Buah Musholla sedangkan Gereja berjumlah 10 buah dan Vihara 24 buah. Dengan melihat mayoritas penduduk kecamatan Pasir limau Kapas beragama Islam maka untuk meuwujdkan kehidupan beragama, Pemerintah kecamatan Pasir Limau Kapas dibantu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan ditambah para mubaliq serta orang alim yang disebut dengan kholifah yang ada di kecamatan Pasir Limau kapas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pendidikan

Dalam peningkatan sumber daya manusia perlu adanya system pendidikan yang lebih baik seperti tenaga pengajarnya yang berkualitas serta didukung sarana dan prasarana yang memadai baik dari sekolah Negeri maupun Swasta yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, jumlah sarana pendidikan terdiri dari :

TABEL 2.4
SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	6
2	TK	6
3	SD	34
4	SLTP	14
5	SLTA	7
Jumlah Sekolah		67 Sekolah

Dari tabel diatas diketahui sarana pendidikan paling banyak di Kecamatan Pasir Limau Kapas adalah tingkat SD berjumlah 34 sekolah disusul tingkat SLTP sebanyak 14 sekolah dan tingkat SLTA sebanyak 7 sekolah, sedangkan TK dan PAUD berjumlah 6 sekolah, jumlah dari keseluruhan sarana pendidikan yang ada dikecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 67 buah sekolah.

5. Kesehatan

Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan kesehatan yang ada dikecamatan Pasir Limau Kapas terdiri dari :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 2.5
SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	2 Unit
2	Posyandu	34 Unit
3	Pustu	4 Unit
4	Polindes	4 Unit
Jumlah		44 Unit

Berdasarkan tabel diatas jumlah sarana kesehatan dikecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 44 unit sarana Kesehatan yaitu 34 Posyandu, 4 unit Pustu, 4 unit Polindes dan 2 unit Puskesmas.

TABEL 2.6
TENAGA MEDIS DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Tenaga Medis	Jumlah
1	Dokter Umum	4 Orang
2	Bidan	38 Orang
3	Paramedis	37 Orang
Jumlah		79 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas jumlah tenaga medis dikecamatan Pasir Limau kapas berjumlah 79 orang yang terdiri dari 38 orang Bidan, 37 orang Paramedis dan 4 orang Dokter Umum.

6. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas memiliki rasa sosial yang sangat tinggi tergambar dari kegiatan sehari-hari yang saling tolong menolong dalam acara pernikahan, kematian, penyambutan bulan suci Ramadhan serta gotong royong dalam membangun negeri. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas melakukan berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Adapun salah satu mata pencarian masyarakat kecamatan Pasir limau Kapas adalah sebagai nelayan dilihat dari hasil penangkapan para nelayan tiap tahunnya.

TABEL 2.7
GAMBARAN EKONOMI DI BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Tangkapan	Hasil Pertahun
1	Ikan Segar	100,18 Ton
2	Ikan Asin	52,5 Ton
3	Udang Segar	505 Ton
4	Udang Kering	72,5 Ton
5	Udang Heko	2.5 Ton
6	Tepung Ikan	295 Kg
7	Ketam	44,5 Ton
8	Siput/Kerang	41.940 Ton

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan untuk sektor perikanan dan kelautan dikecamatan Pasir limau Kapas dapat mendukung peningkatan produksi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pendapatan rumah tangga pertahunnya seperti hasil laut yang ditangkap oleh masyarakat nelayan di perairan kecamatan Pasir limau Kapas.

Dari segi ekonomi perikanan masyarakat kecamatan Pasir Limau kapas juga ada yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan memiliki jumlah lahan pertanian di dua kepenghuluan yaitu:

TABEL 2.8
GAMBARAN EKONOMI DI BIDANG PERTANIAN

No	Kepenghuluan	Luas lahan
1	Kepenghuluan Pasir limau kapas	478,88 Ha
2	Kepenghuluan Sungai Daun	712,03 Ha

Melalui program dan kegiatan usaha tani yang telah dilakukan secara bertahap umumnya sehingga terjadi peningkatan luas lahan dan produksi dari berbagai komoditas seperti lahan yang digunakan untuk berbagai jenis tanaman perkebunan, pembangunan disektor pertanian sangat meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija dan hortikultura, sehingga peningkatan produksi perkebunan lainnya melalui intensifikasi, dan rehabilitas tanaman pangan dengan memiliki jumlah lahan pertanian yaitu dikepenghuluan Pasir Limau Kapas 478,88 Ha dan kepenghuluan Sungai Daun 712,03 Ha.

TABEL 2.9
GAMBARAN EKONOMI DI BIDANG PERKEBUNAN

No	Jenis Tanaman	Hasil Pertahun
1	Kelapa	15 Ton
2	Sawit	500 Ton

Perkebunan yang diproduksi dalam pertahunannya yang dikelola oleh masyarakat setempat seperti kelapa mencapai 14 Ton pertahun dan kelapa sawit mencapai 500 Ton pertahun yang terletak di tiga kepenghuluan yang ada dikecamatan Pasir limau kapas yaitu Kepenghuluan Panipahan laut, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas dan Kepenghuluan Sungai Daun.

Dari segi ekonomi bidang perikanan, pertanian dan perkebunan masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas juga terdapat usaha industri yang dikelola oleh masyarakat langsung untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat seperti pengolahan kerang menjadi kripik, pembuatan batik, pengolahan buah kedabu menjadi dodol, pengolahan ikan menjadi kerupuk, di samping itu juga memiliki tempat perdagangan pertokoan dan pasar yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada dikecamatan Pasir Limau Kapas.

C. Lokasi Penelitian

Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan daerah pesisir dimana arus lalu lintas sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk menghubungkan antara

daerah satu dengan yang lainnya dan sebagian besar jalan yang ada di kecamatan Pasir Limau Kapas adalah pelantaran beton yang menghubungkan 4 kepenghuluan dan 1 kelurahan, sedangkan 3 kepenghuluan lainnya memiliki jarak tempuh yang jauh dan harus menggunakan arus lalu lintas laut.¹⁰ Maka dari itu peneliti memilih tempat penelitian di 4 kepenghuluan dan 1 kelurahan yaitu:

TABEL 2.10
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Lokasi Penelitian	Penjahit dan Souvenir
1	Kepenghuluan Panipahan Darat	Bintarayani, Eka, Rokiyah dan Sodariah
2	Kepenghuluan Panipahan Laut	Usman Ali
3	Kepenghuluan Panipahan	Abdul Yazid
4	Kepenghuluan Teluk Pulaui	Srik
5	Kelurahan Panipahan Kota	Masni

Berdasarkan tabel diatas peneliti memilih lokasi penelitian di 4 kepenghuluan dan 1 kelurahan dikecamatan Pasir Limau Kapas, hal ini disebabkan mudahnya jarak tempuh peneliti ketempat lokasi tersebut dibandingkan dengan 3 kepenghuluan seperti kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kepenghuluan Sungai Daun Dan Kepenghuluan Pulau Jemur yang memiliki jarak tempuh yang jauh dan kondisi jalan yang tidak bisa ditempuh jika hujan turun harus melalui lalu lintas laut.¹¹

¹⁰Dokumen Kecamatan Pasir Limau Kapas 2021

¹¹ Observasi lokasi penelitian di Kecamatan Pasir Limau Kapas pada bulan oktober 2020

D. Data Pengusaha Jahitan Dan Souvenir

Pengusaha jahitan dan souvenir adalah tempat pembuatan pakaian seperti kebaya, jas, pakaian pengantin, celana, baju, rok jilbab, pakaian sekolah serta kerajinan tangan lainnya yang terbuat dari bahan kain. Dengan itu dapat dilihat dari hasil observasi peneliti dengan pengusaha jahitan dan pengrajin souvenir di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.11
DATA PENGUSAHA JAHITAN DAN PENGRAJIN SOUVENIR
DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

No	Nama	Umur	Lama Usaha	Usaha
1	Rokiyah	41 tahun	25 tahun	Penjahit Pakaian Wanita
2	Usman Ali	52 tahun	35 tahun	Penjahit Pakaian Laki-laki
3	Abdul Yazid	63 tahun	46 tahun	Penjahit Pakaian Laki-laki
4	Eka	35 tahun	5 tahun	Penjahit Kerudung/Jilbab
5	Bintarayani	56 tahun	36 tahun	Penjahit Pakaian Wanita
6	Sodariyah	65 tahun	48 tahun	Penjahit Pakaian Wanita
7	Srik	36 tahun	7 tahun	Souvenir dan Penjahit
8	Masni	35 tahun	10 tahun	Souvenir dan Penjahit

Berdasarkan tabel data diatas bahwa pengusaha jahitan dan pengrajin souvenir berumur dari 35 tahun sampai dengan 65 tahun, sedangkan lama usahanya dari 5 tahun sampai dengan 48 tahun, adapun usaha yang dijahit adalah pakaian lelaki dan pakaian perempuan, dan 2 di antaranya adalah pengrajin souvenir di Kecamatan Pasir Limau Kapas.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹²

Menurut etimologi jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar secara mutlak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

¹² Suhrawardi dan K.Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta Timur: PT.Sinar Grafika, 2012), h.139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Mereka itu orang yang mengambil kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk”

Dalam ayat ini kesesatan di tukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu

Surat At-Taubah ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga.

Ayat tersebut berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Alquran. Dan siapakah yang lebih menepatkan janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”¹³

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan

oleh ulama mazhab yaitu :

a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

- 1) Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya menurut cara yang khusus.

¹³ Helmi Karim, “*Fiqh Muamalah*”, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta menurut acara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁴
- b. Malikiyah, seperti halnya hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut : jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh pihak dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu jual beli adalah akad *mu'wadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.¹⁵

- c. Syafi'iyah memberikan definisi sebagai berikut.

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah 2010),h.173

¹⁵ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ualama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun berupa barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.¹⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Surah Al-Baqarah ayat 275:

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah 2010),h.174

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya : “Allah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tiada salahnya kamu mencari rezeki dari tuhanmu”

Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”¹⁷

Dasar hukum jual beli dari sunnah antara lain:

Hadis dari Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya : “Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jula beli yang diberkati. (HR al-Bazzar dan al-Hakim).

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro, 2008)



Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang di riwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW. Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya : “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”

Hadis Abi Sa'id:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya : “pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada” (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah Hadis yang Shahih)¹⁸

Hadis Ibnu 'Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : “dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar, dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan Sabda-sabda Rasulullah diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh).

Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syatibi, pakar fiqh

¹⁸Muhammad Bin Ismail Al-Amir, “*Subulus Salam*”, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2017),h.664

¹⁹Ibid,h.666



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.²⁰

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap yang saling tukar-menukar, atau saling memberi. Redaksi lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²¹

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. *Ijab* dan *Qabul*

a) Pengertian *ijab* dan *qobul*

²⁰ Nasrun Harun, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.114.

²¹ A.Syafi'i Jafri, "*Fiqh Muamalah*", (pekanbaru : Suska Press, 2002)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *ijab* menurut hanafiah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *Qobul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qobul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual maka pernyataan penjual itu adalah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli adalah *qobul*, dan juga sebaliknya.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, Pengertian *Ijab* dan *Qobul* adalah sebagai berikut.

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Qobul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian *ijab* dan *qobul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qobul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qobul*, meskipun dinyatakan pertama kali.²²

b) *Shighat Ijab dan Qobul*

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.

c) *Sifat Ijab dan Qobul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qobul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qobul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat.

²²Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah 2010),h.143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

3. *Maqud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Maqud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang.²³

E. Syarat-syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

2. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

²³Rahmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Ketidakjelasan

Yang di maksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

b) Pembatasan dengan waktu

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: *“saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”*. Jual beli seperti ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.²⁴

c) Penipuan

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*.

d) Kemudharatan

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *“Fiqh Muamalat”*, (jakarta : Amzah, 2010).h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

e) Syarat-syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.²⁵

3. Syarat kelangsungan jual beli

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat yaitu:

a) Kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-tasarruf-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

²⁵Suhrawardi dan K.Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta Timur: PT.Sinar Grafika, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan.

4. Syarat mengikatnya jual beli

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.²⁶

F. Persyaratan Dalam Jual Beli

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tdiak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁷

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT pada surah Al-maidah ayat 1 :

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah 2010),h.150.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, "*pengantar Fiqh Muamalah*", (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²⁸

Artinya: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Persyaratan yang dibenarkan agama

Adapun persyaratan yang dibenarkan agama, misalnya;

- a) Persyaratan yang sesuai dengan tuntunan akad. Misalnya; seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi persyaratan disini bisa bertujuan sebagai penekanan.
- b) Persyaratan *washfiyah*, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran. Misalnya; pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya warna hijau atau pembayaran tidak tunai.
- c) Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin) atau barang agunan. Pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak untuk menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Amzah 2010),h.152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya, penjual mobil menyatakan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
- e) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misalnya, penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapatkan tetangga yang kurang baik.
- f) Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Misalnya: penjual berkata “saya jual mobil ini kepadamu seharga Rp40.000.000,- dengan syarat anda jual rumah anda kepada saya seharga Rp150.000.000,-. Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qardh*.²⁹
- g) Syarat *jaza’i*(persyaratan denda), yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika objek-objek akadnya adalah kerja dan bukan harta. Misalnya seseorang menjual mobil secara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan membayar angsuran kepada pembeli sebanyak satu persen dari dari harga keseluruhan untuk setiap bulan terlambat.

²⁹Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012), h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Syarat *takliqiyah*. Misalnya, penjual berkata “saya jual mobil ini kepadamu dengan harga Rp50.000.000,- jika orang tuaku setuju”. Lalu pembeli berkata “saya terima”. Dan jika orang tuanya setuju maka akad menjadi sah.

2. Persyaratan yang dilarang agama

Adapun persyaratan yang dilarang oleh agama, misalnya:

- a) Persyaratan yang mengabungkan akad *qardh* dengan *ba'i*, misalnya; pak Ahmad meminjamkan uang kepada pak Khalid sebanyak Rp50.000.000,- dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat pak Khalid menjual mobilnya kepada pak Ahmad seharga Rp30.000.000,-.

Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju *rba*, karena harga mobil pak Ahmad mungkin lebih mahal daripada tawaran pak Ahmad, akan tetapi ia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diberikannya.

- b) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya, seseorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad, karena tujuan akad *ba'i* adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan adanya persyaratan ini maka akad *ba'i* semu.³⁰

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azam, “*Fiqh Muamalat*”, (jakarta : Amzah, 2010).



G. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.³¹

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.³²

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

³¹ Imam Mustofa, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),h.25

³²Nasrun Harun, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000),h.121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai'al-gara* (jual beli tipuan).
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah tentang memperjualbelikan ikan didalam air di atas.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli al-‘arbaun (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang serahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual).
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan.³³

³³Nasrun Harun, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000),h.121.



H. Kewajiban Penjual dan Pembeli

1. Kewajiban penjual

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

- a) Menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli.
- b) Menanggung atau menjamin barang tersebut.

2. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian maka pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan, apabila sipembeli tidak membayar harga barang tersebut, maka sipenjual dapat menuntut pembatalan perjanjian jika sipenjual tidak menyerahkan barangnya.³⁴

I. Larangan Jual Beli Dalam Islam

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan salah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tsharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli orang gila
- b. Jual beli anak kecil

³⁴ Miru Ahmadi, "*Hukum Kontrak Bernuansa Islam*", (Jakarta : Rajawali Press, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli orang buta
- d. Jual beli terpaksa
- e. Jual beli *fudhuli*, yaitu orang yang membelanjakan harta milik orang lain tanpa izin syar'i dari si pemilik. Definisi ini mengecualikan wakil, pemegang wasiat, dan semacamnya.

Kata *fhuduli* dikalangan ahli fiqih mencakup setiap orang yang membelanjakan barang yang bukan miliknya, tidak diwalikan kepadanya, atau pengurusannya tidak diwakilkan kepadanya, misalnya peng-ghashab yang membelanjakan barang hasil ghashab-nya engan menjualnya atau lainnya, atau suami menjual barang milik istri tanpa seizinya.
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli malja, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh.³⁵

2. Terlarang sebab *shighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Ada beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

³⁵ Abu malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, "*Shahih Fikih Sunnah*", (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), h. 444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Jual beli mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul³⁶

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bwasangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalh yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli gharar, yaitu jual beli batang yang mengandung kesamaran
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghoib*), tidak dapat dilihat
- h. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Terlarang sebab *syara*'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli *riba*, yaitu *riba nasiah* dan *riba fadhl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- b. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- c. Jual beli diwaktu azan jumat
- d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- e. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli memakai syarat.³⁷

J. Khiar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiar terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Khiar majelis*, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah SAW. Bersabda :

³⁷ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010, h.93-101.



الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ فَا.

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiar selama belum berpisah” (Riwayat Bukhori dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiar majelis tidak berlaku lagi, batal.

2. *Khlar Syarat*, yaitu penjual didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000,- dengan syarat khiar selama tiga hari”. Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.

Artinya: “Kamu boleh Khiar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (Riwayat Baihaqi).

3. *Khlar 'Aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “Saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.³⁸

K. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmani dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia

³⁸Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya.

Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup didunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.³⁹

Ketahuilah bahwa allah menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial. Artinya, manusia membutuhkan sesamanya untuk bertukar pikiran dan berinteraksi dalam mencukupi segala kebutuhannya. Adapun caranya dapat melalui jual beli, persewaan, bercocok tanam, atau hal lain yang dapat menyatukan manusia dalam satu komunitas yang tidak terpisah, hidup berdampingan. Maka, jika manusia hidup secara individual, maka akan merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

L. Akad

1. Pengertian Akad

Akad sengaja dibahas dalam bab tersendiri, karna akad boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah.

³⁹Siah Khosyi'ah, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2014),h.71.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, "*Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*", (Jakarta : Gema Insani 1997), h.435.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Akad dalam bahasa arab **العَقْدُ** yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁴¹

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang lain.

Kemudian tindakan yang berupa perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu tindakan yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad, terbagi pada dua bagian yaitu :

- a. Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpakan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak. Akad semacam ini tidak memerlukan kabul, sekalipun tindakan semacam ini, oleh sebagian ulama fiqh termasuk akad. Oleh ulama Mazhab hanafi dikatakan, bahwa tindakan seperti ini, hanya mengikat pihak yang melakukan ijab saja.
- b. Tidak ada mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti

⁴¹ Enang Hidayat, “*Fiqih Jual beli*”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim (pengadilan). Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama fiqh menetapkan, bahwa tindakan semacam ini, tidak dapat dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.

Lebih lanjut Mustafa az-Zarqa, menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad. Sebab setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.⁴²

2. Rukun Akad

Menurut Jumhur fukaha, rukun akad terdiri :

- a. Pernyataan untuk mengikat diri
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Objek akad

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad objek akad tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi).

Sighah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan kabul dengan suatu ketentuan :

⁴² Helmi karim, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Raja grafindo Press, 2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendakan masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan kabul itu memiliki nilai kekuatan yang sama.⁴³

3. Syarat-syarat Akad

- a. Syarat *In'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud akad menjadi batal.

Syarat ini ada dua macam :

1. Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, dan objek akad.
2. Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya.

- b. Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis.
- c. Syarat *Nafadz* (Kelangsungan Akad)

⁴³M.Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam", (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003).h.101-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat yaitu:

1. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, akadnya batal.⁴⁴
2. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila didalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*. Hak orang lain tersebut ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain.
 - b) Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, seperti *tasarruf* orang yang pailit yang belum dinyatakan *mahjur 'alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada kreditor.
 - d. Hak tersebut berkaitan dengan kemashlahatan si *aqid*, bukan dengan barang yang menjadi objek akad. Syarat *Luzum* yaitu mengikat, untuk mengikatnya suatu akad, seperti jual beli dan *ijarah*, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di-*fasakh*-nya akad oleh salah satu

⁴⁴Nasrun Harun, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pihak. Apabila didalam kad tersebut terdapat *khiyar*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar ru'yat*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁴⁵

4. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan shighat-nya, dan dari segi maksud dan tujuannya. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut ulama menjadi dua bagian :

a. Akad *sahih* yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu :

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya.
- 2) Akad *mauqud* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah 2010), h153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi mengikuti atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan) *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).⁴⁶

- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas.

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu:

- a. Kepemilikan
- b. Menghilangkan kepemilikan

⁴⁶Abdul Aziz Muhammad Azam, "*Fiqh Muamalat*", (jakarta : Amzah, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kemutlakan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- e. Penjagaan.⁴⁷

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu:

- a. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu :
 - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
 - 2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad.
 - 3) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*).
- b. *Hazl*, ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-ngolok (*istihza*) yang dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut.⁴⁸

5. Berakhirnya Akad

- a. Berakhirnya akad karna *fasakh* (pembatalan)
 - 1) *Fasakh* karena akadnya rusak
 - 2) *Fasakh* karena *khiyar*
 - 3) *Fasakh* karena *iqalah*

⁴⁷ A.Syafi'i Jafri, "Fiqh Muamalah", Pekanbaru : Suska Press, 2008),h.56

⁴⁸ Ibid,h.57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Fasaqh* karena tidak bisa dilaksanakan
- 5) *Fasakh* karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah terwujud.

b. Berakhirnya akad karna kematian

c. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dalam akad *mauquf*

Akad *mauquf* dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Misalnya dalam akad *fudhuli*. Persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku apabila pelaku *fudhuli* atau orang berakad dengannya meninggal dunia. Dengan demikian, akad berakhir sebelum adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik, untuk menjaga kredibilitasnya.⁴⁹

⁴⁹Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010),h.49.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Praktek jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit adalah dengan mengumpulkan sisa jahitan tersebut kemudian di manfaatkan dan di jual kembali.
2. Berdasarkan analisis penulis dengan meninjau teori dan literatur yang berkaitan dengan fiqh muamalah, maka jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit tidak melanggar syariah dan diperbolehkan. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pengusaha jahitan sebaik sisa jahitan tersebut dikembalikan kepada pemesan dan meminta izin dulu sebelum memanfaatkan sisa jahitan tersebut, baik sisa kain yang berukuran kecil maupun sisa jahitan yang berukuran besar, walaupun nantinya akan di iklaskan oleh pemesan.
2. Bagi pemesan jahitan sebaiknya menanyakan kembali mengenai sisa kain jahitan dari kain yang di bawa walaupun tidak bermanfaat bagi pemesan.

3. Bagi pengusaha jahitan dan pemesan sebaiknya ada perjanjian (akad) mengenai kain sisa jahitan tersebut, supaya tidak terjadi kerugian dan kekecewaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Ahmadi Miru, “*Hukum Kontra Bernuansa Islam*”, (Bandung : Jakarta, Penerbit Amzah, 2010)
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, “*Targhib Wa Tarhib*” (Jakarta : Pustaka AZZam, 2007).
- Al-Farbi Muclas, “*Hidup Lebih Berkah Tanpa Riba*” (Yogyakarta : Penerbit Araska Publisher, 2006)
- Al-Jarjawi Syekh Ali Ahmad, “*Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuahu*”, (Jakarta :Gema Insani 1997)
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2008)
- Dokumen Kecamatan Pasir Limau Kapas 2021
- Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama 2007)
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2015)
- <https://rumaysho.com>.
- Jafri A.Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)
- Karim hakim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Khosiyah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Jak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- K. Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur : PT. Sinar Grafika, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2012)
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers 2016)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)
- Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007)
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Ma'rif, 1997)
- Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D"
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada 2014)
- Syafei Rahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001)
- Tim Visi yustisia, *KUHD kitab Undang-undang hukum dagang*, (Jakarta : Penerbit visimedia, 2014)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir* yang ditulis Oleh :

Nama : **Muhammad Ridwan**
 NIM : 11522105042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Haniah Lubis., ME.Sy

Penguji I
Dr. Johari., M.Ag

Penguji II
Dr. M.Ihsan., M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38739
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1827/2021 Tanggal 10 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RIDWAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11522105042 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

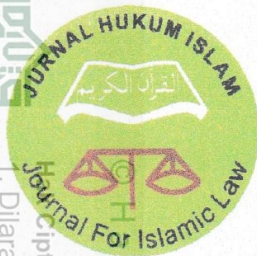
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RIDWAN

NIM : 11522105042

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KAIN SISA
JAHITAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN
ROKAN HILIR

Pembimbing: Dr. Zulfahmi Bustami, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010